

BAB V

KESIMPULAN

Prinsip non-intervensi adalah prinsip hukum internasional yang membatasi kemampuan negara luar untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Namun, ada beberapa tindakan intervensi yang disahkan dan dilarang. Tindakan intervensi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB terkandung dalam bab VII Piagam PBB, Intervensi dengan undangan oleh Pemerintah dengan tujuan memberikan bantuan kepada mereka yang menjalankan hak menentukan nasib sendiri, Intervensi terbuka untuk melindungi warga negaranya di negara lain, Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB, Intervensi dalam bentuk pembelaan diri setelah adanya armed attack kepada negaranya, Intervensi yang berhubungan dengan negara protektorat atas dominionnya, Intervensi kepada negara yang telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional, Intervensi yang didasarkan pada dasar kemanusiaan (Humanitarian Intervention dan prinsip Responsibility to Protect).

Sedangkan intervensi yang dilarang berupa campur tangan diktator yang menggunakan use of force dan yang tidak menggunakan use of force, memberikan bantuan ekonomi kepada partai politik dan bentuk campur tangan lainnya dalam proses politik internal negara, intervensi dalam perang saudara, ancaman melakukan kekerasan kepada negara lain, mengganggu struktur sosial atau ekonomi di negara lain, menggulingkan atau mengubah sistem politik negara lain atau pemerintahnya, menimbulkan ketegangan antara atau diantara negara-negara, menghilangkan identitas nasional dan warisan budaya masyarakat, merusak kebebasan, kemerdekaan, atau integritas negara manapun, mengorbankan sipil dan menumbangkan kehendak rakyat di negara manapun, memberikan bantuan keuangan, menghasut atau mentolerir subversif, teroris, kegiatan bersenjata yang ditujukan untuk menggulingkan rezim negara lain dengan kekerasan, ikut campur dalam perselisihan sipil, menghilangkan kendali suatu negara atas masalah internal negaranya sendiri, mendukung oposisi internal di dalam urusan internal atau eksternal negara lain seperti pilihan system politik, ekonomi, sosial budaya, dan perumusan kebijakan luar negeri, mendukung gerakan pemberontakan,

mempengaruhi situasi di negara lain yang umumnya dilakukan melalui acara radio atau televisi dengan tujuan untuk mendorong pemberontakan atau perselisihan sipil di negara lain, memberikan sanksi, embargo, dan boikot dengan mengganggu perdagangan dan pelayaran serta penolakan akses melalui darat dan air, melarang ekspor dan impor atau penerapan kebijakan ekonomi eksternal sementara mengambil tindakan berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, dan merugikan negara yang diintervensi.

Dukungan Vanuatu dalam memperjuangkan dan membawa kasus HAM Papua dalam forum-forum internasional dan mendukung gerakan separatis Papua dilatarbelakangi oleh suku, ras, suku bangsa, adanya aliansi, kedekatan secara geografis, dan karakteristik satu saudara terkait solidaritas Melanesia serta berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar atau bersama yaitu pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua. Namun, kebijakan luar negeri Vanuatu terkait kritikan nya dalam Sidang Umum PBB, Sidang Dewan HAM PBB terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Papua tidak bertentangan dengan prinsip non-intervensi karena di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, berlaku kebebasan berpendapat dimana semua pihak dapat mengaspresiasi suara mereka secara bebas.

Yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB adalah dukungannya terhadap gerakan separatis Papua, yakni:

1. Secara diam-diam mengundang Ketua ULMWP, Benny Wenda untuk menyerahkan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan, yang berisi permintaan referendum kemerdekaan Papua dari Indonesia kepada Komisioner Tinggi Badan HAM PBB yang merupakan campur tangan politik internal negara NKRI
2. Mendukung gerakan separatis Papua (ULMWP dan WPNCL) yang melakukan tindakan subversif sehingga secara tidak langsung Vanuatu mentolerir dan mendukung subversif, serta mendukung gerakan pemberontakan
3. Memberikan bantuan keuangan dengan memfasilitasi Kantor Perwakilan Papua (ULMWP) di Port Vila
4. Intervensi subversif dengan mempengaruhi situasi di Papua, dilakukan melalui siaran pers dan acara televisi nasional Vanuatu dengan tujuan untuk mendorong

pemberontakan gerakan separatis dan perselisihan sipil antara Indonesia dengan Papua

5. Melakukan propaganda kepada komunitas internasional untuk mendukung kemerdekaan rakyat Papua serta mendorong organisasi internasional dan pemerintah negara lain untuk ikut serta mengadvokasi penentuan hak nasib sendiri untuk warga Papua yang merupakan campur tangan politik

Sementara menyediakan tempat tinggal untuk para pemberontak dan pendukung kemerdekaan Papua, resolusi yang mendukung hak penentuan nasib sendiri Papua Barat, peningkatan tekanan internasional pada Indonesia terkait pelanggaran HAM di forum-forum internasional, dan pembentukan UU Wantok Blong Yumi yang menegaskan pengakuan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia merupakan pelanggaran minoris generis terhadap pelanggaran prinsip non-intervensi dan hanya dinyatakan sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap pemerintah Indonesia tetapi tidak dilarang oleh hukum internasional.

Terkait *humanitarian intervention*, tidak ada pembenaran hukum untuk intervensi sepihak oleh suatu negara atau beberapa negara atas dasar kemanusiaan atau mereka yang menentukan nasib sendiri di bawah hukum internasional. Intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu atas dasar kemanusiaan pun tidak memenuhi kriteria layak untuk melakukan intervensi atas dasar kemanusiaan sesuai dengan data yang penulis temukan.

Karena Vanuatu dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah meminta pertanggungjawaban kepada Vanuatu berupa restitusi, kompensasi, dan pemenuhan. Sengketa dapat diselesaikan pula dengan cara negosiasi untuk mencapai kesepakatan agar Vanuatu berhenti mendukung gerakan separatis Papua, konsiliasi, mediasi, atau cara damai lainnya yang dipilih sendiri.

Namun, apabila upaya-upaya diatas tidak berhasil, Indonesia dapat mengajukan sengketa ini ke Mahkamah Internasional dengan menempuh beberapa prosedur penyelesaian sengketa internasional untuk menggugat Vanuatu sesuai dengan cara yang tertera pada Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adolf, H. (1991). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aust, A. (2007). *Modern Treaty Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dörr, O., & Schmalenbach, K. (2012). *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*. Heidelberg: New York Springer.
- Evans, M. D. (2006). *International Law, Fifth Edition*. New York: Oxford University Press.
- Hingorani, R. C. (1984). *Modern International Law*. New York: Oceana Publications.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2006). *Papua Menggugat*. Jakarta: Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
- McGoldrick, D. (1994). *The Principle of Non-Intervention: Human Rights*. Liverpool: Vaughan Lowe.
- Parthiana, I. W. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Raic, D. (2002). *Statehood and the Law of Self-Determination*. Netherland: Brill, Nijhoff.
- Sefriani. (2010). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujatmoko, A. (2005). *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Starke, J. (1998). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- von der Dunk, F. G. (1992). Liability versus Responsibility in Space Law: Misconception or Misconstruction? *Proceedings of the 34th Colloquium on the Law of Outer Space*, 363.
- Dr. Wirjono Prodjodikoro, S. (1967). *Azaz-azaz Hukum Publik Internasional*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa.

Jurnal :

- Anthony, D. (2001). There is No Norm of Intervention or Non Intervention in International Law. *International Legal Theory*, 407-408.
- Australian Red Cross. (2011). International Humanitarian Law and the Responsibility to Protect. *Australian Red Cross*, 5-11.

- Bayuseno, A. B., & Windiani, R. (2020). Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum-Forum Internasional. *Jurnal Departemen Hubungan Internasional*, 218-219.
- Borders, W. (1983). South Pacific Rebel Seized. *The New York Times*, 7.
- Crocombe, R. G. (2007). *Asia in the Pacific Island: Replacing the West*. Suva: The Geographical Journal.
- Elisabeth, A. (2006). Dimensi Internasional Kasus Papua. *Jurnal Penelitian Politik*, 3(1), 44.
- Elisabeth, A., Widjojo, M. S., Cahyadi, R., & Blegur, S. (2004). *Pemetaan Peran & Kepentingan Para Aktor Dalam Konflik di Papua*. Jakarta: Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
- Dubay, C. (2014). General Principles of International Law. *International Judicial Academy, American Society of International Law*.
- Gardiner, R. (2015). Part II Interpretation Applying the Vienna Convention on the Law of Treaties, A The General Rule, 5 The General Rule: The Treaty, its Terms, and their Ordinary Meaning. *Oxford Public International Law*, 7-8.
- Hakim, I. (2018). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Prinsip Non-Intervensi Sebagaimana Terdapat Dalam Resolusi Majelis Umum PBB 2625 (XXV) Tahun 1970. *Universitas Indonesia Library*, 93-107.
- Helmy, B. (2019). Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 26-27.
- Herjuno, M. (2010). PELAKSANAAN PRINSIP NON-INTERVENSI DI ASEAN (STUDI KASUS MYANMAR). *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 12-13.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al' Adl*, 10-11.
- Linderfalk, U. (2015). Is Treaty Interpretation an Art or a Science? International Law and Rational Decision Making. *The European Journal of International Law*, 171-175.
- Media, V. (2008). Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Tesis Universitas Diponegoro*, 65.
- Morse, O. (1960). Schools of Approach to the Interpretation of Treaties. *Catholic University Law Review*, 39-42.
- Murahman, M. (2018). TINDAKAN PUBLIKASI ATAS ISU KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP KAUM BERAGAMA DI MEDIA SOSIAL (FACEBOOK) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM . *IAIN Tulungagung Institutional Repository* , 25-28.
- Nainggolan, P. P. (2014). International Activities of Papua Separatist Movement. *Jurnal Kajian DPR*, 183-184.

- Onuf, N. G. (1971). The Principle of Nonintervention, the United Nations, and the International System. *JSTOR*, 209-227.
- Pradipta, C. (2014). PELANGGARAN PRINSIP NON-INTERVENSI OLEH NEGARA PERANCIS. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1-2.
- Pustorino, P. (2018). The Principle of Non-Intervention in Recent Non-International Armed Conflicts. *Questions of International Law*, 1-2.
- Putra, I. E. (2020). Papua and Human Rights Violations. *ResearchGate*, 1-3.
- Rattan, J. (2019). Changing Dimensions of Intervention Under International Law: A Critical Analysis. *SAGE Journal*, 2-3.
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*, 94-104.
- Sationo, T. I. (2019). HUMANITARIAN INTERVENTION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA. *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Widya Pranata Hukum*, 11-13.
- Siburian, E. E., & Afriansyah, A. (2018). SPORT DIPLOMACY AND STATE SOVEREIGNTY: CASE STUDY ON INDONESIA'S EFFORT TO GUARD THE SOVEREIGNTY OF PAPUA. *Universitas Indonesia Journal*, 62-80.
- Sigar, S. J. (2020). SEPARATIST MOVEMENT: UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA IN PACIFIC ISLAND FORUM 2014-2018. *University Darussalam Repository Thesis*.
- Syahputra, G. N., Legionosuko, T., & Madjid, A. (2019). INDONESIA'S STRATEGY FOR MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG) MEMBER IN FACING FREE PAPUA MOVEMENT PROPAGANDA: STUDY CASE OF REPUBLIC VANUATU. *Jurnal Peperangan Asimetris*, 34-35.
- Tarrow, S. G. (2011). Power in Movement Social Movements and Contentious Politics. *Cambridge Studies in Comparative Politics*.
- Temaluru, T. B. (2016). Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 573-577.
- Usmawadi. (1988). Tinjauan Singkat Tentang Interpretasi Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969. *Pendidikan Journalistik Hukum V*, 295.
- Wardhani, B. (2015). Dari Lokal ke Internasional. *Mengamati Gejala Internasionalisasi*.
- Widiastari, W. A. (2014). Kepentingan Nasional Vanuatu Mengangkat Kasus Pelanggaran HAM Di Papua Barat Pada UN Human Rights Council. *Universitas Brawijaya Thesis*, 6-7.
- Wood, S. M. (2009). The Principle of Non-Intervention. *Encyclopedia Princetoniensis*.

Internet :

- Admin idtesis.com. (2012, Januari 4). *Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif*. Retrieved from idtesis.com: <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>
- Aditya, N. R. (2020, Desember 10). *Total 40 Pelanggaran HAM di Papua Sepanjang 2020*, Kontras: Setiap Bulan Pasti Ada Kasus. Retrieved from KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/14531831/total-40-pelanggaran-ham-di-papua-sepanjang-2020-kontras-setiap-bulan-pasti?page=all>
- Ali. (2016, Oktober 24). *Uti Possidetis Juris, Prinsip yang Digunakan Indonesia untuk "Menjaga" Papua*. Diambil kembali dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt580d876150d84/uti-possidetis-juris-prinsip-yang-digunakan-indonesia-untuk-menjaga-papua/>
- Amindoni, A. (2021, Mei 19). *Pertikaian Papua dan Palestina, warganet: 'Informasi terkait Palestina jauh lebih banyak dibanding Papua'*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57163673>
- Anggaraeni, P. D. (2020, Oktober 1). *Mengenal Sejarah Vanuatu, Negara yang Serang Indonesia pada Sidang PBB, Dulu Bernama Hebrides Baru*. Retrieved from ringtimesbali.com: <https://ringtimesbali.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-28789111/mengenal-sejarah-vanuatu-negara-yang-serang-indonesia-pada-sidang-pbb-dulu-bernama-hebrides-baru>
- Asia Pacific Report. (2020, Juli 23). *'We won't drop our support for West Papua,' pledges Vanuatu's PM*. Retrieved from Asia Pacific Report: <https://asiapacificreport.nz/2020/07/23/we-wont-drop-our-support-for-west-papua-pledges-vanuatus-pm/>
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. (2018, Oktober 2). *Vanuatu Langgar Prinsip Kedaulatan Negara Indonesia*. Retrieved from DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22382/t/javascript>
- CFR Staff Council on Foreign Relations. (2020, Agustus 25). *The Role of the UN General Assembly*. Retrieved from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounder/role-un-general-assembly>
- Chaebar, H. (2020, Oktober 1). *Balas Vanuatu dengan Kata Non-Intervensi, Kontras Sebut Indonesia Terkesan Anti Kritik Soal Papua*. Retrieved from Tribun News: <https://www.tribunnewswiki.com/2020/10/01/balas-vanuatu-dengan-kata-non-intervensi-kontras-sebut-indonesia-terkesan-anti-kritik-soal-papua?page=2>
- Christian. (2019, Mei 2). *THE PRINCIPLE OF NON-INTERVENTION IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW*. Retrieved from Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union: <http://www.aalep.eu/principle-non-intervention-contemporary-international-law>
- CNN Indonesia. (2019, Januari 31). *KTHAM PBB Kaget Benny Wenda 'Menyusup' dalam Delegasi Vanuatu*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190131084205-106-365278/ktham-pbb-kaget-benny-wenda-menyusup-dalam-delegasi-vanuatu>

- CNN Indonesia. (2020, Agustus 18). *Mahasiswa Papua Surabaya Peringati Setahun Rasisme 'Monyet'*. Retrieved from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200818121144-20-536793/mahasiswa-papua-surabaya-peringati-setahun-rasisme-monyet>
- CNN Indonesia. (2020, September 28). *Vanuatu, Negara Kecil yang Dukung Kemerdekaan Papua*. Retrieved from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200928075602-113-551633/vanuatu-negara-kecil-yang-dukung-kemerdekaan-papua>
- Davidson, H. (2018, Oktober 2). *Indonesia Accuses Vanuatu of 'inexcusable' support for West Papua*. Retrieved from The Guardian:
<https://www.theguardian.com/world/2018/oct/03/indonesia-accuses-vanuatu-of-inexcusable-support-for-west-papua>
- DW Made for minds. (2019, Februari 1). *Indonesia Gunakan Isu HAM Sudutkan Vanuatu Soal Papua*. Retrieved from DW Made for minds.:
<https://www.dw.com/id/indonesia-gunakan-isu-ham-sudutkan-vanuatu-soal-papua/a-47321267>
- Free West Papua. (2021, April 5). *UN Human Rights Chief and Vanuatu Condemn Indonesian Abuses in West Papua*. Retrieved from Free West Papua Campaign:
<https://www.freewestpapua.org/2021/04/05/un-human-rights-chief-and-vanuatu-condemn-indonesian-abuses-in-west-papua/>
- Gannon, C. W., & Elmslie, J. (2014, November 16). *MSG Headache, West Papuan Heartache? Indonesia's Melanesian Foray*. Retrieved from The Asia-Pacific Journal: <https://apjjf.org/2014/12/47/Jim-Elmslie/4225.html>
- Graue, C. (2013, September 30). *Vanuatu PM accuses UN of ignoring Papuans*. Retrieved from ABC NEWS: <https://www.abc.net.au/news/2013-09-29/an-vanuatu-west-papua-call/4987824>
- Hakwa, C. (2020, Februari 22). *Lini Day Commemorated*. Retrieved from Vanuatu Daily Post: https://dailypost.vu/news/lini-day-commemorated/article_1c6bf494-54fe-11ea-8105-e77f522a179f.html
- Hariyadi, M. (2020, Februari 10). *Indonesia and Vanuatu clash over West Papua at UN*. Retrieved from AsiaNews: <http://www.asianews.it/news-en/Indonesia-and-Vanuatu-clash-over-West-Papua-at-UN-51194.html>
- Hasan, R. A. (2019, Februari 1). *Vanuatu Angkat Bicara Merespons Kecaman Keras RI soal Isu Papua*. Retrieved from Liputan 6:
<https://www.liputan6.com/global/read/3885098/vanuatu-angkat-bicara-merespons-kecaman-keras-ri-soal-isu-papua>
- Hidayat, W. A., & Raditya, I. N. (2019, Juli 30). *Sejarah Kemerdekaan Vanuatu & Dukungan Papua Merdeka*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/sejarah-kemerdekaan-vanuatu-dukungan-papua-merdeka-efhx>
- Hidayatullah, A. (2016, September 29). *Diplomat Cantik Indonesia "Skakmat" 6 Pimpinan Negara di PBB*. Retrieved from suara.com:

<https://www.suara.com/news/2016/09/29/123636/indonesia-diserang-6-negara-di-pbb-diplomat-muda-ini-menangkis>

- Human Rights Papua. (2016, Oktober 14). *International Debate on West Papua*. Retrieved from The International Coalition for Papua : <https://www.humanrightspapua.org/resources/210-international-debate-on-west-papua#UNHRC46>
- Ibrahim, F. M. (2020, Oktober 28). *United Liberation Movement for West Papua Bentuk UUD Sementara Papua Merdeka*. Retrieved from ABC News: <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-10-27/gerakan-pembebasan-west-papua-bentuk-konstitusi-sementara/12818044>
- JPNN.com. (2020, September 28). *Mengenal Vanuatu, Negara yang Menuding Pemerintah Indonesia Melakukan Pelanggaran HAM di Papua*. Retrieved from JPNN.com: <https://www.jpnn.com/news/mengenal-vanuatu-negara-yang-menuding-pemerintah-indonesia-melakukan-pelanggaran-ham-di-papua>
- Karafir, A. (2017, September 25). *Negara Pasifik Serang Indonesia di PBB*. Retrieved from papuanews.id: <https://papuanews.id/2017/09/25/negara-pasifik-serang-indonesia-di-pbb/>
- Kaufman, M. T. (1999, Februari 23). *Walter Lini, 57, Clergyman Who Led Nation of Vanuatu*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/1999/02/23/world/walter-lini-57-clergyman-who-led-nation-of-vanuatu.html>
- Komnas HAM Republik Indonesia. (2020). *Laporan Data Pengaduan*. Retrieved from Komnas HAM Republik Indonesia: <https://www.komnasham.go.id/index.php/data-pengaduan/>
- Kurniawan, W. (2019, September 24). *Indonesia Events of 2019*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/indonesia>
- Mampiooper, D. (2020, Maret 24). *Melawan Lupa Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua*. Retrieved from Jubi: <https://jubi.co.id/melawan-lupa-kasus-pelanggaran-hak-asasi-manusia-ham-di-papua/>
- Mardiyah, F. (2020, Oktober 7). *Ada apa dengan Vanuatu, Papua Barat, dan Indonesia?* Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/ada-apa-dengan-vanuatu-papua-barat-dan-indonesia-f5zF>
- May, R. (2011, Februari 8). *The Melanesian Spearhead Group: Testing Pacific Island Solidarity*. Retrieved from Australian Strategic Policy Institute: https://www.files.ethz.ch/isn/161797/Policy_Analysis74_Melanesian_spearhead_group.pdf
- McGarry, D. (2020, Oktober 16). *Keeping West Papua on the Agenda*. Retrieved from theinterpreter: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/keeping-west-papua-agenda>

- McWhinney, E. (1965, Desember 21). *Audiovisual Library of International Law*. Retrieved from The United Nations: <https://legal.un.org/avl/ha/peaceandsecurity.html>
- Mukaromah, V. F. (2020, September 28). *Diingatkan Jangan Ikut Campur, Sudah Beberapa Kali Vanuatu Singgung Isu Papua di Sidang PBB*. Retrieved from KOMPAS.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/28/133200465/diingatkan-jangan-ikut-campur-sudah-beberapa-kali-vanuatu-singgung-isu?page=all>
- Neier, A. (2019, Februari 21). *Venezuela's Maduro Needs to Go, But U.S. Military Intervention Isn't the Way*. Retrieved from America's Quarterly: <https://www.americasquarterly.org/article/venezuelas-maduro-needs-to-go-but-u-s-military-intervention-isnt-the-way/>
- Nossiter, B. D. (1981, Juli 9). *VANUATU, NEW PACIFIC NATION, MOVING TOWARD SEAT AT U.N.* Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/1981/07/09/world/vanuatu-new-pacific-nation-moving-toward-seat-at-un.html>
- Paralegal. (1999, September 23). *Pengertian Hak Jawab*. Retrieved from Portal Hukum dan Peraturan Indonesia: <https://paralegal.id/pengertian/hak-jawab/>
- PMC Multimedia. (2015, April 11). *VIDEO: Tagata Pasifika features the West Papuan struggle in Talanoa*. Retrieved from Pacific Media Centre: <https://pmc.aut.ac.nz/pacific-media-watch/video-tagata-pasifika-features-west-papuan-struggle-talanoa-9204>
- Raharusun, H. M. (2020, Desember 29). *Kalau Tak Ingin Papua Lepas Seperti Timor-Timur, Jangan Abaikan Hak-Hak Sosial-Budaya Masyarakat Papua*. Retrieved from The Global Review: <https://theglobal-review.com/kalau-tak-ingin-papua-lepas-seperti-timor-timur-jangan-abaikan-hak-hak-sosial-budaya-masyarakat-papua/>
- Ramli, H. (2015, Juni 24). *Kepentingan Indonesia di Balik Instabilitas Politik Vanuatu*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/haramli/54f8460fa3331175618b50ea/kepentingan-indonesia-di-balik-instabilitas-politik-vanuatu?page=all>
- Redaksi Ilmugeografi. (2020). *Mengenal Negara Vanuatu, Negara Kepulauan Yang Terancam Tenggelam*. Retrieved from ilmugeografi.com: <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/negara-vanuatu>
- Santoso, B., & Nirmalasari, R. R. (2020, Oktober 29). *Terungkap! Ini Kronologi Lengkap Pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua*. Retrieved from suara.com: <https://www.suara.com/news/2020/10/29/135257/terungkap-ini-kronologi-lengkap-pembunuhan-pendeta-yeremia-di-papua?page=all>
- Saputra, G. (2020, Juni 26). *Hari Ini Dalam Sejarah: 26 Juni 1945, Piagam PBB Ditandatangani*. Retrieved from Solopos: <https://www.google.co.id/amp/s/m.solopos.com/hari-ini-dalam-sejarah-26-juni-1945-piagam-pbb-ditandatangani-1067760/amp>

- Tempo.co. (2003, Agustus 19). *Vanuatu Dukung Kemerdekaan Papua*. Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/11004/vanuatu-dukung-kemerdekaan-papua>
- The Alliance of Independent Journalists. (2008, Oktober 29). *Pedoman Hak Jawab*. Retrieved from Aliansi Jurnalis Independen Bengkulu: <https://bengkulu.aji.or.id/pedoman-hak-jawab/>
- Utama, A. (2017, Oktober 26). *Pemerintah Indonesia Tak Bisa Cegah Negara Pasifik Angkat Isu Papua di PBB*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41764268>
- Wicaksono, A. (2021, Maret 31). *AS Beberkan 8 Pelanggaran HAM Indonesia selama 2020*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210331180744-134-624582/as-beberkan-8-pelanggaran-ham-indonesia-selama-2020/1>
- Wyeth, G. (2018, Februari 16). *At Melanesian Spearhead Group, the Question of West Papuan Membership Lingers*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/02/at-melanesian-spearhead-group-the-question-of-west-papuan-membership-lingers/>

Peraturan Perundang-Undangan :

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (International Law Commission at its fifty-third session, in 2001.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sekretariat Negara RI. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.*

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Kasus :

NICARAGUA v. UNITED STATES OF AMERICA (International Court Justice Juni 27, 1986).

Transkrip UN Charter General Assembly & Forum Internasional Lainnya :

Pacific Islands Forum Secretariat. (2019, Agustus 16). *FIFTIETH PACIFIC ISLANDS FORUM* . Retrieved from FORUM COMMUNIQUÉ: <https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2019/08/50th-Pacific-Islands-Forum-Communique.pdf>

United Nations. (1945, Juni 26). *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional*. Retrieved from United Nations:

https://unic.un.org/aroundworld/unic/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf

- United Nations. (2013, September 28). *Prime Minister Addresses General Debate, 68th Session*. Retrieved from The United Nations Web TV:
<https://gadebate.un.org/en/68/vanuatu>
- United Nations. (2014, Maret 4). *Vanuatu, High-Level Segment - 5th Meeting, 25th Regular Session Human Rights Council*. Retrieved from The United Nations Web TV: <http://webtv.un.org/meetings-events/watch/vanuatu-high-level-segment-5th-meeting-25th-regular-session-human-rights-council/3290028806001#full-text>
- United Nations. (2016, September 23). *Vanuatu - Prime Minister Addresses General Debate, 71st Session*. Retrieved from The United Nations Web TV:
<http://webtv.un.org/%E2%80%A6/28th-regular-session-of%E2%80%A6/3986426598001/watch/vanuatu-prime-minister-addresses-general-debate-71st-session/5138529826001/?term=&sort=popular>
- United Nations. (2017, Maret 1). *The United Nations Web TV*. Retrieved from Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council:
<http://webtv.un.org/meetings-events/watch/vanuatu-high-level-segment-8th-meeting-34th-regular-session-human-rights-council-/5341236808001>
- United Nations. (2017, Maret 1). *The United Nations Web TV*. Retrieved from Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council : <http://webtv.un.org/meetings-events/watch/vanuatu-high-level-segment-8th-meeting-34th-regular-session-human-rights-council-/5341236808001>
- United Nations. (2017). *Third International Decade for the Eradication of Colonialism*. Retrieved from United Nations:
https://www.un.org/dppa/decolonization/sites/www.un.org.dppa.decolonization/files/2017_7_statements_melanesian_spearhead_group.pdf
- United Nations. (2017, September 21). *Vanuatu - Prime Minister Addresses General Debate, 72nd Session*. Retrieved from The United Nations Web TV:
<http://webtv.un.org/watch/vanuatu-prime-minister-addresses-general-debate-72nd-session/5582458666001/>
- United Nations. (2018). *Repertoire of the Practice of the Security Council*. Retrieved from United Nations:
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/final_webfile_english_repertoire_-1-add.19_.pdf#page=243
- United Nations. (2018, September 28). *Vanuatu - Prime Minister Addresses General Debate, 73rd Session*. Retrieved from The United Nations Web TV:
<http://webtv.un.org/watch/vanuatu-prime-minister-addresses-general-debate-73rd-session/5841644701001/>
- United Nations. (2018, September 19). *Vanuatu Statement on situation of Indigenous Peoples in West Papua on 19 September 2018 at the 39th Regular Session of the UNHRC*. Retrieved from The United Nations Web TV:
<https://www.humanrightspapua.org/resources/210-international-debate-on-west-papua#StVanHRC34>

- United Nations. (2019). *REPERTOIRE OF THE PRACTICE OF THE SECURITY COUNCIL SUPPLEMENT 2016–2017*. Retrieved from United Nations: https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/final_webfile_english_repertoire_-1-add.20.pdf#page=276
- United Nations. (2019, September 18). *The United Nations Web TV*. Retrieved from General Debate 18th Meeting 42nd Regular Session Human Rights Council: <https://www.youtube.com/watch?v=wuE1ygh9L9U>
- United Nations. (2019, September 27). *Vanuatu - Prime Minister Addresses General Debate, 74th Session*. Retrieved from The United Nations Web TV: <http://webtv.un.org/watch/vanuatu-prime-minister-addresses-general-debate-74th-session/6090138188001/>
- United Nations. (2020). *Repertoire of the Practice of the Security Council Supplement 2018*. Retrieved from United Nations: https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/final_webfile.pdf#page=242
- United Nations. (2020, September 26). *The United Nations Web TV*. Retrieved from Vanuatu Addresses West Papua Concern on Human Rights Council 45th Session: <https://www.youtube.com/watch?v=3xrFo8ZrRv4>
- United Nations. (2020, September 26). *Vanuatu - Prime Minister Addresses General Debate, 75th Session*. Retrieved from The United Nations Web TV: <http://webtv.un.org/watch/vanuatu-prime-minister-addresses-general-debate-75th-session-/6194868679001/>
- United Nations. (2021, Februari 24). *The United Nations Web TV*. Retrieved from Pacific Islands Forum, High-Level Segment - 7th Meeting, 46th Regular Session Human Rights Council: <http://webtv.un.org/search/pacific-islands-forum-high-level-segment-7th-meeting-46th-regular-session-human-rights-council/6234890899001/?term=Pacific%20Islands%20Forum%20Secretary%20General&sort=popular>
- United Nations Human Rights. (2018, Februari 7). *Opening remarks by UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein at a press conference during his mission to Indonesia*. Retrieved from Office of the High Commissioner UNHR: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22638&LangID=E>